

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas serta tanggung jawab, dan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Sebagai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintahan baik Pusat maupun pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan perlu memperbaiki tata kelola penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan sistem yang dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran peraturan daerah di Kota Tangerang Selatan, karena masyarakat adalah pihak utama yang dapat memantau apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah di sekitar, tetapi terkadang masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan laporan pelanggaran Peraturan Daerah karena terbatas dengan jarak dan waktu tempuh untuk melakukan pelaporan dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan latar belakang ini maka dibuat Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah untuk, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan pelanggaran Peraturan Daerah, Satpol PP mampu mengelola laporan pelanggaran Peraturan Daerah dengan sistematis, dan mempermudah seluruh stakeholder dalam melakukan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan, telah mendapati adanya sejumlah masalah, yaitu:

1. Masyarakat masih melaporkan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan proses secara manual, yaitu mendatangi langsung kantor Satpol PP sehingga

pmasyarakat sering kali mengalami kesulitan karena terbatas nya jarak dan waktu.

2. Belum adanya tata kelola penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.
3. Belum adanya Sinkronisasi antar dinas dalam menangani pelanggaran Peraturan Daerah.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir**

#### **1.3.1 Tujuan**

Membangun Sistem Informasi Penanganan Laporan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan.

#### **1.3.2 Manfaat**

Manfaat yang didapat dan diharapkan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut adalah:

1. Sistem dapat memudahkan masyarakat dalam memberi laporan pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Sistem mampu melacak proses penanganan laporan pelanggaran Peraturan Daerah;
3. Sistem mempermudah dalam pengelolaan laporan pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk;
4. Sistem dapat mempermudah koordinasi antar dinas/instansi untuk menangani laporan pelanggaran Peraturan Daerah;
5. Meminimalisir keterlambatan penanganan laporan akibat lambatnya proses pelaporan secara langsung dan membantu proses penindakan pelanggaran Peraturan Daerah
6. Masyarakat dapat melaporkan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan proses secara online , tanpa harus mendatangi langsung kantor Satpol PP.
7. Terciptanya tata kelola penanganan pelanggaran Peraturan Daerah
8. Membantu memonitoring laporan penanganan pelanggaran peraturan daerah yang telah diolah secara daring.
9. Terjalin nya Koordinasi dan Sinkronisasi antar dinas dalam menangani pelanggaran Peraturan Daerah

#### 1.4 Batasan Masalah

Supaya pembahasan yang sedang dilakukan lebih terstruktur dan terarah serta tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka diberi batasan-batasan dari permasalahan beserta ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran peraturan daerah hanya dalam lingkup wilayah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ruang lingkup organisasi perangkat daerah yang menangani pelanggaran peraturan daerah
2. Sistem memiliki ruang lingkup pemanfaatana yang meliputi proses pelaporan pelanggaran peraturan daerah, proses tracking penanganan laporan pelanggaran peraturan daerah, dan proses penanganan pelanggaran peraturan daerah dengan dinas/instansi terkait.
3. Pembangunan sistem model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan metode Waterfall dan menggunakan *Data Flow Diagram (DFD)* sebagai alat pemodelan sistem.
4. Pembangunan sistem informasi penanganan laporan pelanggaran peraturan daerah memanfaatkan bahasa pemrograman PHP yang dilengkapi *Framework CodeIgniter*.

#### 1.5 State of The Art

Penyusunan tugas akhir ini mengadopsi beberapa referensi penelitian sebelumnya dan juga beberapa jurnal yang berhubungan dengan tugas akhir ini. Referensi dari beberapa jurnal beserta pembahasannya ada pada **Tabel 1.1** berikut ini.

Tabel 1.1 Tabel *State of The Art*

Judul Jurnal	Pembahasan
<p><b>Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Lingkup Desa Gunung tanjung Berbasis Web Dan Sms Gateway Dengan Metode Antrian Fifo</b></p> <p><b>Peneliti</b> Cahya Firmansyah, Cucu Tohir</p> <p><b>Lokasi</b> MTs Negeri 2 Tasikmalaya</p> <p><b>Tahun</b> 2018</p> <p><b>Nama Jurnal</b> Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika (JUMANTAKA)</p>	<p><b><u>Hasil Penelitian:</u></b></p> <p>Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan , peneliti telah membangun sebuah sistem layanan pengaduan masyarakat yang dapat memberikan respon lebih cepat dan efektif untuk pengguna. Aplikasi yang dibangun sudah dapat menghubungkan masyarakat dengan Pemerintah Desa Gunungtanjung..</p> <p><b><u>Persamaan :</u></b></p> <p>Jurnal ini memiliki kasus penelitian yang serupa dengan sistem yang akan di bangun pada Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu dari metode pengembangan aplikasi yang akan dibuat serta metode <i>waterfall</i> sebagai metode pengembangan aplikasi ini.</p> <p><b><u>Perbedaan :</u></b></p> <p>Pada jurnal ini memberikan pelayanan masyarakat melalui pesan singkat atau SMS, Sedangkan sistem yang akan dirancang dapat memberikan pelayanan pengaduan masyarakat langsung melalui sistem.</p>
<p><b>Sistem Informasi Aplikasi Pengaduan Berbasis Web (Studi Kasus : Dinas</b></p>	<p><b><u>Hasil Penelitian:</u></b></p> <p>Sistem Informasi Aplikasi</p>

<p><b>Sosial Provinsi Jawa Timur).</b></p> <p><b>Peneliti</b> Van Alam Sancoko</p> <p><b>Lokasi</b> Provinsi</p> <p><b>Tahun</b> 2017</p>	<p>Pengaduan yang digunakan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berguna untuk mengetahui kinerja instansi tersebut untuk mengetahui kekurangan dalam melayani masyarakat.</p> <p><b><u>Persamaan :</u></b> Pada jurnal ini juga membahas mengenai pengaduan yang dilakukan masyarakat.</p> <p><b><u>Perbedaan :</u></b> Pada jurnal ini dilakukan pemodelan dengan menggunakan UML bersumber dari pemodelan use case sedangkan pada sistem yang akan di bangun oleh Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan Dfd dan Erd. Pada jurnal ini berfokus terhadap pelaporan pengaduan masyarakat pada Dinas saja dan pengaduan keluhan yang berkaitan dengan secara umum dan pelayanan pada dinas tersebut dan sesuai dengan tugas fungsi. Sedangkan pada sistem yang akan di bangun merupakan sistem untuk pengaduan laporan pelanggaran peraturan daerah secara menyeluruh.</p>
---	---

<p><b>Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Masyarakat Berbasis Web di Kabupaten Pekalongan</b></p> <p><b>Peneliti</b> Richa Amalia Permatasari Bayu Priyambadha Achmad Arwan</p> <p><b>Lokasi</b> Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya</p> <p><b>Tahun</b> 2018</p> <p><b>Nama Jurnal</b> Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer</p>	<p><b><u>Hasil Penelitian:</u></b> Sistem informasi merupakan suatu peningkatan mutu dan kualitas dalam hal pelayanan pengaduan masyarakat. Sistem informasi adalah suatu media dan sarana informasi data yang disajikan ke masyarakat mengenai prosedur dan ketetapan hukum mengenai pelanggaran Peraturan Daerah.</p> <p><b><u>Alasan Menjadi Tinjauan Penelitian:</u></b> Jurnal ini dapat membantu membuka pemikiran tentang banyaknya aplikasi Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah serta bagaimana menentukan platform yang cocok untuk digunakan pada penerapan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan</p>
--	---

## 1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada proses pengembangan aplikasi Penanganan Pelaporan Pelanggaran Peraturan Daerah berbasis *web* ini menggunakan metode *Waterfall* dengan langkah-langkah sebagai berikut :

## 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, buku – buku, dan sumber terkait lainnya yang menjadi acuan dalam membangun website ini.

teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas akhir ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### a. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang ada di lapangan seperti mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan melihat pelayanan kinerja Pegawai serta cara kerja dalam memberikan layanan laporan pengaduan pelanggaran perda. Observasi dilakukan selama beberapa minggu pada bulan Oktober.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan di lokasi tempat kerja pembuat tugas akhir ini dengan pihak yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diangkat yaitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja dari hasil wawancara di dapatkan gambaran umum pelayanan kinerja pegawai serta cara kerja dalam memberikan pengaduan.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah usaha yang telah dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Data terkait yang di dapat pada Unit Satuan Polisi Pamong Praja antara lain: Struktur Organisasi, Data Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan dan data Laporan pengaduan yang sedang berjalan serta seperti jurnal yang terkait dengan penelitian sistem informasi pengaduan layanan masyarakat berbasis web.

## 2. Analisis Sistem

Dilakukan analisis terhadap sistem menggunakan DFD dan ERD dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk

menyelesaikan masalah secara efektif yang akan dibuat dengan menggunakan teknik pemodelan SDLC (System Development Life Cycle), Analisis sistem dilakukan dengan berdiskusi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Perundang - Undangan selaku Penagakan Peraturan Daerah, guna mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan sesuai kebutuhan.

### 3. Perancangan Sistem Informasi Penanganan Laporan Pelanggaran Peraturan Daerah

Setelah tahap analisis dilakukan masuk ke tahap perancangan. Pada tahap perancangan melakukan perancangan dari hasil tahap analisis, tabel tabel yang diperlukan dengan relasi antar tabel serta membuat perancangan menu menggunakan Microsoft Visio dan Microsoft Office agar lebih mudah dipahami. Perancangan sistem dilakukan dengan berdiskusi dengan kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Perundang undangan selaku Penagakan Peraturan daerah, guna mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan sesuai kebutuhan

### 4. Implementasi

Pada tahap ini merupakan implementasi dari hasil perancangan yang telah dibuat. Implementasi dilakukan dengan berdiskusi bersama beberapa bidang yang menangani pelanggaran peraturan daerah, simulasi dilakukan terhadap sistem atau bagian yang masih memerlukan perbaikan, sistem akan di bangun dan disaring, setelah itu sistem akan di sosialisasikan kepada user yang menjadi admin Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah.

### 5. Pengujian dan Pemeliharaan

Pada tahap ini pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui aspek fungsi dari aplikasi. Hal ini dilakukan oleh sistem informasi, admin , dan para target aplikasi atau dalam hal ini user. Pada tahap ini merupakan pemeliharaan jika dalam proses penggunaannya terdapat fitur yang perlu diperbaiki. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan saat sistem aplikasi digunakan oleh user.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang disusun dalam penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing babnya memiliki sub bab sebagai pendukung penjelasan yang terdiri dari:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada Bab 1 ini berisi pendahuluan yang merupakan penjelasan mengenai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat d, ruang lingkup dan batasan masalah, *State of the art*, metode penelitian yang digunakan dan sistematik penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab 2 ini berisikan tinjauan pustaka tentang landasan teori pengertian yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah tugas akhir yang di jelaskan dan teori yang mendukung dalam perancangan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan.

### **BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

Pada Bab 3 berisikan analisis permasalahan. Analisis kebutuhan, analisis sistem, diagram konteks, dan rancangan aplikasi, desain database, perancangan menu, gambaran umum pembuatan program sekaligus perancangan tampilan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan.

### **BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Pada Bab 4 dibahas mengenai deskripsi pembuatan dan hasil implementasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang sesuai dengan perancangan serta evaluasi dari aplikasi tersebut dan tahap pengujian sistem.

### **BAB 5 PENUTUP**

Pada Bab 5 ini dipaparkan kesimpulan – kesimpulan yang didapat dari masalah yang sedang dipecahkan, dan kesimpulan dalam membangun aplikasi dan saran yang berguna dari hasil penelitian maupun dalam pengembangan berikutnya.